

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Kamis, 03 Oktober 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	kamis, 03 Oktober 2019	Air Laut Terhalau Air Tawar Tak Terjangkau	Untuk diketahui, Muara Baru merupakan salah satu titik prioritas dalam proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN). Tahap pertama dari proyek yang juga dikenal dengan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) digarap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa panjang tanggul yang perlu segera dibangun mencapai 29,05 kilometer. Hingga saat ini tanggul yang terbangun baru mencapai 8,22 kilometer.
2	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	kamis, 03 Oktober 2019	KPPIP Reformasi Aturan Fiskal	Dalam upaya meningkatkan peran swasta dalam pengerjaan proyek infrastruktur, komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPPI) melakukan reformasi fisik,, institusi, dan regulasi.
3	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	kamis, 03 Oktober 2019	Trans-Jawa Bentuk pola Ekonomi baru	Konektivitas jalan bebas hambatan di Jawa di nilai telah membetuk pola kegiatan ekonomi baru. Simpul arus barang dan penumpang kini mulai merata sejak koridor jalan tol Trans-Jawa tersambung sejak akhir 2018
4	Bisnis Indonesia (Halaman 8)	kamis, 03 Oktober 2019	Kementerian PUPR Kerjakan Akses Jalan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memutuskan untuk mengerjakan akses jalan Jembatan Pulau Balang yang menjadi porsi Pemerintah provinsi Kalimantan Timur.
5	Bisnis Indonesia (Halaman 9)	kamis, 03 Oktober 2019	Proyek Restorasi Ditaksir Rp394 Miliar	Rencana restorasi Sungai Sekanak-lambirado, kota Palembang, ditaksir bakal memerlukan biaya sekitar Rp394 Miliar.
6	Koran Tempo (Halaman 4)	kamis, 03 Oktober 2019	Tuntut Ganti Rugi, Warga Ancam Duduki Jalan Tol Cijago	Korban pengurusan proyek jalan tol Cinere-jagorawi (Cijago) menuntut pemerintah segera membayar ganti rugi atas lahan Mereka mengancam akan menduduki jalan tol Cijago jika dalam sepekan ke depan tuntutan itu tidak di penuhi. “kalau dalam seminggu ini tidak di bayar , kami akan tongkrongin, kami akan tutup (tol). “Kata Asmawi, 59 tahun, kemarin.
7	Majalah Indonesia hal 2	Kamis, 03 Oktober 2019	Porsi swasta Lebih Besar di Proyek Infrastruktur	Lima Tahun ke depan,223 proyek strategis selesai di berbagai daerah, pemerintah melibatkan swasta dan BUMN untuk membiayai proyek senilai Rp6.455 triliun
8	Republka hal 3	Kamis, 03 Oktober 2019	HTI Dikembangkan Jadi Sentra Ibu Kota Baru	Pemerintah hingga saat ini belum menetapkan lokasi pusat ibu kota baru.

9	Majalah Indonesia hal 10	Kamis, 03 Oktober 2019	Pindah ke Kalimantan Tanpa Ribet	Lima menteri tetap bersemangat Mengusug Program pemindahan ibu kota. Dua Negara jadi contoh sukses memindahkan ibu kota kurang dari lima tahun
10	Kompas hal 16	Kamis, 03 Oktober 2019	Kaji Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota	Pemerintah diharapkan Mengkaji aspek social dalam pemindahan ibu kota Negara ke Kalimantan timur . kajian tersebut penting agar proses pembangunan dan pemindahan berjalan tertib

Judul	Air Laut Terhalau Air Tawar Tak Terjangkau	Tanggal	kamis, 03 Oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Untuk diketahui, Muara Baru merupakan salah satu titik prioritas dalam proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN). Tahap pertama dari proyek yang juga dikenal dengan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) digarap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa panjang tanggul yang perlu segera dibangun mencapai 29,05 kilometer. Hingga saat ini tanggul yang terbangun baru mencapai 8,22 kilometer.		

► CERITA DARI MUARA BARU

Air Laut Terhalau, Air Tawar Tak Terjangkau

Jakarta banjir. Di Bogor Angin Ribut. Sebait lagu Benyamin Sueb berjudul *Kompot Meledak* mengalun dari pengeras suara milik Iwan (42). Tak ada yang istimewa dengan lagu itu. Hanya, banjir cukup lekat bagi Iwan, warga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

Di bawah naungan terpal, Iwan bercerita Muara Baru kerap dilanda rob atau banjir air laut. Permukiman terendam menjadi hal yang tak bisa dicegah karena air laut tak bisa dibendung. “[Ketinggian] Banjir itu sampai dua meter. Sekarang sih sudah tidak was-was karena proyek [tanggul] sudah selesai,” tuturnya saat ditemui *Bisnis* di Muara Baru, Rabu (2/10).

Sebagaimana namanya, Muara Baru terletak di bibir pantai Teluk Jakarta. Dalam tiga puluh tahun terakhir, perubahan ekstrem terjadi di Muara Baru: air laut yang semula di bawah, kini di berada di atas.

Simang, 54, bercerita, tanah di permukiman perlahan ambles. Kondisi tanah yang terus ambles membuat air laut tak terbendung. Tak ayal banjir rob kerap melanda.

Penurunan muka tanah atau *land subsidence* terlihat dari pemandangan di RT 20 / RW 17, Kelurahan Penjaringan. *Bisnis* menjumpai, di lorong sepanjang 50 meter, rangka pintu atas maupun loteng bisa digapai dengan tangan. Maka, tinggi bangunan hanya sekira dua meter.

“Setiap tahun turun tanahnya. Tahun 85 [1985], air [laut] masih di bawah. Sekarang malah di atas,” tuturnya.

Deretan rumah di sepanjang lorong berhadapan dengan tanggul setinggi empat meter. Di atas tanggul, kolam dan tanah kosong seluas lapangan sepakbola terhampar.

Tak terpaut jauh, Stasiun Pompa Waduk Pluit Timur Berdiri. Walhasil, paket komplit untuk mencegah rob di Muara Baru telah tersedia.

Warni, 54, pemilik warung Tegal di Muara Baru mengaku banjir bandang kini tak lagi datang. Dia ingat, banjir sekira dua meter terakhir menggenangi Muara Baru pada 2007. “Sekarang hanya rembes dan becek aja. Sejak ada tanggul sudah gak banjir lagi,” ujar Warni yang telah bermukim di Muara Baru sejak 1979.

Untuk diketahui, Muara Baru merupakan salah satu titik prioritas dalam proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN). Tahap pertama dari proyek yang juga dikenal dengan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) digarap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa panjang tanggul yang perlu segera dibangun mencapai 29,05 kilometer. Hingga saat ini tanggul yang terbangun baru mencapai 8,22 kilometer.

Dari panjang tersebut, Kementerian PUPR mendapat porsi 7,22 kilometer dan kini sudah terbangun sepanjang 4,5



MENCEGAH BANJIR ROB DI JAKARTA

Muara Baru merupakan salah satu titik prioritas dalam proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN). Tahap pertama dari proyek yang juga dikenal dengan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) digarap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.

Pembangunan proyek tanggul tersebut bertujuan agar air laut tidak masuk ke daratan (banjir rob) dan juga mencegah berlakunya penurunan muka tanah.

Sumber: Kementerian PUPR

Pembangunan Proyek National Capital Integrated Coastal Development

Instansi	Lokasi pekerjaan
Kementerian PUPR	• PPI Kamal Muara (Pantai) • Pluit (Muara Baru, Utara Waduk Pluit) • Kalibaru
Pemprov DKI Jakarta	• PPI Kamal Muara • Pelabuhan Muara Angke • Pelabuhan Sunda Kelapa (Sisi Timur Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman)
Swasta	• Pantai Muara (PT Intiland) • Kali Bencong Barat (KBN) • Pantai Ancol • (PT Pembangunan Jaya)

BISNIS/TRI UTOMO

kilometer. Tanggul yang belum dibangun terus dikerjakan dan diharapkan rampung pada akhir 2019. Lokasi tanggul yang dikerjakan Kementerian PUPR tersebar di Muara Baru, Kamal Muara, dan Kali Baru.

Sementara itu, porsi pembangunan tanggul oleh Pemerintah DKI Jakarta dan swasta masing-masing mencapai 7,03 kilometer dan 14,9 kilometer. Pemerintah DKI Jakarta telah membangun tanggul sejauh 4,42 kilometer, sedangkan progres swasta masih nihil.

Berdasarkan dokumen Kementerian PUPR, progres pembangunan tanggul yang menjadi porsi swasta nihil karena terbentur regulasi. Hingga kini belum ada aturan hukum yang menugaskan kalangan swasta untuk membangun tanggul.

MINIM AIR BERSIH

Sejauh ini, tanggul memang ampuh menangkal rob. Namun, masih ada masalah pelik yang

cukup membelit warga Muara Baru, yaitu air bersih.

Nur, warga Muara Baru mengeluh tidak jaringan sistem penyediaan air minum di Muara Baru. Dia dan warga lain tidak punya pilihan lain kecuali membeli air dalam jeriken.

“Sehari bisa Rp30.000 buat beli air. Satu jeriken Rp15.000.”

Warni juga masygul, tidak ada air PAM yang mengalir. Tinggal di bibir pantai juga membuatnya tak bisa menggali sumur untuk menyedot air tanah. “Mau tidak mau harus beli. Habis mau bagaimana lagi,” ujarnya pasrah.

Secara umum, akses air bersih, terlebih lewat jaringan perpipaan di Jakarta belum merata. PAM Jaya melansir, cakupan pelayanan air minum baru mencapai 60%.

Saat air laut bisa dihalau berkat adanya tanggul, air tawar belum bisa dihadirkan dengan harga terjangkau. Pekerjaan rumah masih belum tuntas. ■

Judul	KPPIP Reformasi Aturan Fiskal	Tanggal	kamis, 03 Oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Dalam upaya meningkatkan peran swasta dalam pengerjaan proyek infrastruktur, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) melakukan reformasi fiskal,, institusi, dan regulasi.		

► PERCEPATAN INFRASTRUKTUR

KPPIP Reformasi Aturan Fiskal

Bisnis, JAKARTA — Dalam upaya meningkatkan peran swasta dalam pengerjaan proyek infrastruktur, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) melakukan reformasi fiskal, institusi, dan regulasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, yang menjabat sebagai Ketua KPPIP, mengatakan untuk terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah memerlukan dukungan dari banyak pihak, termasuk swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Menurutnya, guna menarik minat swasta untuk berinvestasi, pihaknya mereformasi di sejumlah bidang yakni fiskal, institusi, dan regulasi.

Reformasi fiskal dilakukan dalam bentuk perumusan langkah dan bentuk pembiayaan seperti penjaminan infrastruktur, VGF (Viability Gap Funding), insentif pajak, dan panduan alokasi risiko.

"Upaya-upaya yang dilakukan tentu tidak saja persoalan pembiayaan. Aspek pembiayaan sudah dirumuskan dengan baik, sehingga jangan sampai pembangunan infrastruktur terlalu membebani APBN," ujarnya, Rabu (2/10).

Kemudian, reformasi institusi yang telah dilakukan pemerintah adalah pembentukan KPPIP, Sarana Multi Infrastruktur, LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) hingga PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia). Sedangkan reformasi regulasi meliputi *direct lending*, pengadaan tanah, dan 15 Paket Kebijakan Ekonomi.

Adapun progres percepatan pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam Proyek

Strategis Nasional (PSN), pada September ini telah merampungkan 81 proyek dengan nilai investasi mencapai Rp390 triliun. Sisanya, sebagian masih dalam tahap konstruksi dan sudah mulai beroperasi sebagian, dan yang lainnya dioperasikan setelah 2019.

Menko Darmin berharap dengan percepatan pembangunan infrastruktur ini akan meningkatkan produk domestik bruto Indonesia yang masih di bawah rata-rata global yang mencapai 70%.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan berfokus kepada pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur perkotaan.

"Pembangunan infrastruktur, bukan hanya yang *backbone* [PSN], tetapi juga fokus pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, kemudian memastikan kegiatan ekonomi terdukung infrastruktur dan pengembangan kota-kota baru," kata Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi, Mohammad Zainal Fatah. (Aprianus Doni Tolok)

Judul	Trans-Jawa Bentuk pola Ekonomi baru	Tanggal	kamis, 03 Oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Konektivitas jalan bebas hambatan di Jawa di nilai telah membentuk pola kegiatan ekonomi baru. Simpul arus barang dan penumpang kini mulai merata sejak koridor jalan tol Trans-Jawa tersambung sejak akhir 2018		

► KONEKTIVITAS TOL

Trans-Jawa Bentuk Pola Ekonomi Baru

Bisnis, JAKARTA — Konektivitas jalan bebas hambatan di Jawa dinilai telah membentuk pola kegiatan ekonomi baru. Simpul arus barang dan penumpang kini mulai merata sejak koridor jalan tol Trans-Jawa tersambung sejak akhir 2018.

Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) menyebut interkoneksi jalan bebas hambatan di Jawa memicu pergerakan arus barang dan arus penumpang. Sekretaris ATI Krist Ade Sudiyono mengatakan mobilitas sangat terkait dengan persembungan jalan.

"Jika ada konektivitas baru, misalnya ada pembangunan jalan tol baru, maka akan menstimulasi trafik dan mobilitas baru," tuturnya kepada *Bisnis*, Selasa (1/10).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melansir jalan tol Trans Jawa sudah mulai melebuhkan arus barang dari daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijamah. Di samping itu, kawasan industri juga diyakini bakal lebih menyebar, terutama di wilayah yang dekat dengan akses jalan tol.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mencontohkan, para pengusaha di Tulung Agung bisa mengirim hasil produksinya ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya lebih cepat. Peluang usaha juga muncul di Nganjuk yang mana investor telah siap membangun kawasan industri di daerah tersebut.

"[Jalan] Tol membuat perilaku masyarakat mulai berubah. Orang Surabaya sekarang buat makan siang saja bisa ke Solo," jelas Basuki di Jakarta, Senin (30/9).

Dia mengungkapkan,

jalan tol Trans-Jawa juga telah membuat Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang lebih memiliki daya tarik bagi pengusaha. Pelabuhan itu menjadi alternatif selain Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta atau Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya.

Dalam catatan *Bisnis*, pergerakan arus barang dari maupun menuju Tanjung Emas tidak terkendala kemacetan sebagaimana terjadi di Jakarta. Pembangunan berbagai proyek infrastruktur di sekitar jalan tol Jakarta-Cikampek menimbulkan hambatan, termasuk arus barang dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

Saat ini, koridor Trans Jawa telah membentang dari Merak hingga Probolinggo sejauh 954 kilometer. Secara khusus, pergerakan barang menuju Pelabuhan Tanjung Emas kini didukung sejumlah ruas tol, antara lain Semarang ABC, Batang-Semarang, dan Semarang-Solo. Dalam dua tahun ke depan, akses juga bertambah berkat penyelesaian jalan tol Semarang-Demak.

Direktur PT Pelabuhan In-

donesia III (Persero) Doso Agung menilai arus barang di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) didorong oleh geliat kawasan industri di Jawa Tengah, antara lain Solo, Boyolali, Demak, dan Pati. Kawasan-kawasan industri tersebut menghasilkan sejumlah komoditas ekspor seperti furnitur, garmen, tekstil, dan hasil pertanian.

AKSES PELABUHAN

Menurut Doso, dalam satu jaringan rantai pasok logistik, pertumbuhan arus barang tidak terlepas dari kelancaran akses jalan menuju pelabuhan.

"Jadi tumbuhnya *through-*

put [arus peti kemas] TPKS sebagai gerbang ekspor impor Provinsi Jawa Tengah, tidak bisa terlepas dari konektivitas jaringan jalan tol Pantura-Semarang-Solo yang dibangun pemerintah," jelas Doso kepada *Bisnis*.

Berdasarkan data Pelindo III, dalam empat tahun terakhir, arus peti kemas internasional dan domestik melalui TPKS terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan hampir 3%. Pada 2015, arus peti kemas di TPKS mencapai 608.199 TEUs (*twenty-foot equivalent unit*). Pada 2018, arus peti kemas di TPKS tercatat 675.021 TEUs. (*Rivki Maulana*)

Judul	Kementerian PUPR Kerjakan Akses Jalan	Tanggal	kamis, 03 Oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 8)		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memutuskan untuk mengerjakan akses jalan Jembatan Pulau Balang yang menjadi porsi Pemerintah provinsi Kalimantan Timur.		

► JEMBATAN PULAU BALANG

Kementerian PUPR Kerjakan Akses Jalan

Bisnis, BALIKPAPAN —Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memutuskan untuk mengerjakan akses jalan Jembatan Pulau Balang yang menjadi porsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Proyek tersebut telah dikerjakan oleh Kementerian PUPR sejak 2016 tetapi belum rampung karena masih terkendala lahan dan akses.

Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Perum Rakyat Kalimantan Timur Taufik Fauzi mengatakan bahwa saat ini berlangsung pembebasan lahan sepanjang 17 km untuk jalan akses menuju Balikpapan.

Pada tahun ini pihaknya berfokus untuk menuntaskan pembebasan lahan dan sedang melakukan inventarisasi.

“Gubernur Kaltim sudah ber-kirim ke pak Menteri (PUPR) agar akses jalan didanai oleh Kementerian PUPR. Desainnya juga sedang diajukan,” jelasnya saat tinjauan IKN ke Pulau Balang Rabu (2/10).

Menurut Taufik, pihaknya sedang memperhitungkan kebutuhan total pembebasan lahan. Namun, untuk tahun ini dalam pembebasan lahan telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp90 miliar.

Saat ini jalur alternatif konek-

tivitas selain menggunakan Feri juga bisa melalui jalan sepanjang 110 km ke arah KM 38. Jalan tersebut kondisinya belum baik sehingga perjalanan dengan jalan tersebut masih memakan waktu hingga 3 jam.

Selain itu, pihaknya juga memperkirakan masih membutuhkan anggaran senilai Rp500 miliar untuk merampungkan jembatan dari bentang Penajam Paser Utara hingga Balikpapan. Dana tersebut di luar kontrak konstruksi APBN berjalan senilai Rp1,3 triliun.

Taufik memperkirakan bahwa proyek jembatan tersebut rampung pada 2021. Penyelesaian bentang sepanjang 880 meter tersebut, saat ini progres konstruksinya sudah mencapai 70%. Namun, target penyelesaian tersebut belum termasuk dengan penyelesaian akses jalan dari Balikpapan dan PPU.

“Untuk bentang pendek ada satu sisi yang sudah selesai dan menggunakan APBD senilai Rp500 miliar,” imbuhnya.

Jembatan Pulau Balang konstruksinya dilakukan oleh konsorsium yang terdiri atas PT Hutama Karya, PT Adhi Karya, dan Bangun Cipta.

Proyek ini dibangun untuk mendukung transportasi dari arah pelabuhan peti kemas Kariangau Balikpapan sekaligus mendukung kawasan industri itu. (Anitana W. Puspa)

Judul	Proyek Restorasi Ditaksir Rp394 Miliar	Tanggal	kamis, 03 Oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 9)		
Resume	Rencana restorasi Sungai Sekanak-lambirado, kota Palembang, ditaksir bakal memerlukan biaya sekitar Rp394 Miliar.		

► SUNGAI SEKANAK-LAMBIDARO

Proyek Restorasi Ditaksir Rp394 Miliar

Bisnis, PALEMBANG – Rencana restorasi Sungai Sekanak—Lambidaro, Kota Palembang, ditaksir bakal memerlukan biaya sekitar Rp394 miliar.

Wali Kota Palembang Harjojo mengatakan bahwa pihaknya sudah melibatkan konsultan untuk mengkaji program restorasi tersebut, termasuk untuk taksiran biaya dan kajian *detail engineering design* (DED).

“Setelah kajian [DED] selesai akan kami laporkan ke Kementerian PUPR karena yang bakal membiayai proyek ini adalah kementerian tersebut,” katanya, Rabu (2/10).

Dia menjelaskan dengan dana sebesar ini, restorasi anak Sungai Musi itu akan menghasilkan objek yang in-

dah dan bisa menjadi destinasi wisata di Kota Palembang.

“Mulai dari transportasi, lingkungan, dermaga, ada taman disepanjang aliran sungai ini. Pokoknya kesan kumuh tidak akan ada lagi,” ujarnya.

Pemkot menargetkan megaprojek pembangunan infrastruktur sungai itu dapat rampung pada 2021. Kemudian pada tahun berikutnya, Sungai Sekanak-Lambidaro diharapkan sudah menjadi tujuan wisata di kota itu.

Sebelumnya, Ketua Tim Kegiatan Perencanaan restorasi Sungai Sekanak-Lambidaro, Agung Setiono, mengatakan final DED ini sudah dilakukan dengan sempurna.

“Besaran dana sudah *fixed* Rp394 miliar dan itu belum

termasuk pembebasan lahan karena masalah pembebasan lahan ini dilakukan oleh pemkot,” katanya.

Agung menjelaskan restorasi ini memang memakan biaya yang sangat besar, terutama dalam pembangunan turap atau dinding sungai, lanskap, dan normalisasi. Ketiga tahapan itu menelan biaya hampir 50% lebih dari dana yang diperlukan.

Menurutnya, di Lambidaro banyak sekali kolam atau rawa-rawa alami yang harus dikembalikan sebagai sebagaimana fungsinya. Dengan demikian, tujuan restorasi sungai tersebut sebagai pengendali banjir bisa terwujud.

“Ada tiga tahapan pelaksanaan pekerjaan ini yakni tahap satu yakni di antaranya me-

lakukan pembangunan perkuatan tebing segmen muara Sungai Sekanak,” katanya.

Tahap kedua yakni melakukan normalisasi atau galian alur sungai segmen muara Sungai Lambidaro sampai Jalan Sukarno Hatta dan lanjut ke tahap ketiga berupa normalisasi sungai.

Kepala Dinas PUPR Kota Palembang Ahmad Bastari mengatakan, untuk pembebasan lahan tahun ini baru dianggarkan Rp10 miliar.

Menurut Bastari, masih ada beberapa lahan atau persil lagi yang belum dibebaskan karena menunggu hasil KJPP.

“Ada beberapa persil di beberapa Sekanak dan Bukit Kecil. Kami targetkan masalah lahan ini selesai pada 2020,” katanya. (Dinda Wulandari)

Judul	Tuntut Ganti Rugi, Warga Ancam Duduki Jalan Tol Cijago	Tanggal	kamis, 03 Oktober 2019
Media	Koran Tempo (Halaman 4)		
Resume	Korban pengurusan proyek jalan tol Cinere-jagorawi (Cijago) menuntut pemerintah segera membayar ganti rugi atas lahan Mereka mengancam akan menduduki jalan tol Cijago jika dalam sepekan ke depan tuntutan itu tidak di penuhi. "kalau dalam seminggu ini tidak di bayar , kami akan tongkrongin, kami akan tutup (tol). "Kata Asmawi, 59 tahun, kemarin.		

METRO

Tuntut Ganti Rugi, Warga Ancam Duduki Jalan Tol Cijago

Pengoperasian jalan tol Cijago seksi II tinggal menunggu surat keputusan menteri.

EDISI, 3 OKTOBER 2019



DEPOK – Korban pengurusan proyek jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) menuntut pemerintah segera membayar ganti rugi atas lahan mereka. Mereka mengancam akan menduduki jalan tol Cijago jika dalam sepekan ke depan tuntutan itu tidak dipenuhi. "Kalau dalam seminggu ini tidak dibayar, kami akan tongkrongin, kami akan tutup (tol)," kata Asmawi, 59 tahun, kemarin.

Untuk menyuarkan tuntutan itu, Asmawi dan sejumlah warga yang senasib dengannya menggelar unjuk rasa di gerbang Jalan Margonda Raya, Depok. Asmawi mengatakan lahannya yang seluas 200 meter persegi terkena proyek jalan tol Cijago. Dia berharap bisa segera menerima uang ganti rugi. "Kami selalu dijanjikan (ganti rugi) sejak 12 tahun lalu. Sampai tol sudah jadi dan akan dioperasikan, tak ada sepeser pun uang dibayarkan," kata dia.

Mukhlis Effendi, kuasa hukum warga, mengatakan masalah ganti rugi lahan ini sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Depok pada Juli 2018. Pengadilan mengabulkan gugatan warga yang menuntut ganti rugi lahan seluas 6.600 meter persegi. "Total nilainya mencapai Rp 33 miliar," kata Mukhlis.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit memastikan pengoperasian jalan tol Cijago seksi II akan berjalan sesuai dengan rencana. PT Translingkar Kita Jaya (TLKJ), sebagai badan usaha pembangunan jalan tol, juga sudah mengajukan permohonan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menerbitkan surat keputusan (SK). "Jadi, sekarang kami tinggal menunggu SK," kata Danang, kemarin.

Danang berharap unjuk rasa yang digelar penduduk ihwal masalah ganti rugi lahan tidak menghambat rencana pengoperasian itu. "Seharusnya tidak (menghambat) ya, karena pembebasan tanah itu paralel dan urusannya ke pengadilan. Saat ini prosesnya masih berjalan," kata Danang.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok, Nina Suzanah, menjelaskan lahan yang disengkatakan oleh warga itu sebenarnya adalah jalan lingkungan yang telah dihibahkan kepada pemerintah daerah. Namun lahan itu tidak tercatat sebagai aset negara. Atas dasar itulah pengadilan kemudian memenangkan gugatan warga. "Semua jalan lingkungan di Kota Depok memang belum ada catatan dalam aset kami," kata Nina.

Direktur PT TLKJ Hilman Muchsin mengatakan, jalan tol Cijago seksi II sudah sangat siap untuk dioperasikan. Rambu-rambu dan kelengkapan jalan tol sudah seluruhnya dipasang. "Hanya tinggal SK pengoperasian dan SK penarifan yang belum ada," kata Hilman.

Untuk uji coba, kata Hilman, sudah dimulai sejak Sabtu lalu. Ia belum bisa memastikan sampai kapan uji coba diterapkan. "Tergantung keputusan Menteri PUPR," kata dia. Namun ia berharap pengoperasian dilakukan secepatnya. Sebab, pembangunan seksi II ini sudah berjalan sembilan tahun sehingga perusahaannya mengalami kerugian. "Kami menanggung bunga yang setiap hari mencapai kurang-lebih Rp 175 juta," kata Hilman.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | SUSENO

Judul	Porsi swasta Lebih Besar di Proyek Infrastruktur	Tanggal	Kamis, 03 Oktober 2019
Media	Majalah Indonesia hal 2		
Resume	Lima Tahun ke depan, 223 proyek strategis selesai di berbagai daerah, pemerintah melibatkan swasta dan BUMN untuk membiayai proyek senilai Rp6.455 triliun		

Porsi Swasta Lebih Besar di Proyek Infrastruktur

Lima tahun ke depan, 223 proyek strategis selesai di berbagai daerah. Pemerintah melibatkan swasta dan BUMN untuk membiayai proyek senilai Rp6.455 triliun.

M ILHAM RAMADHAN AVISENA
 ilham@mediaindonesia.com

DALAM lima tahun ke depan (2020-2024) Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp6.455 triliun untuk membangun infrastruktur. Pemerintah tidak mungkin memikul beban anggaran jumbo tersebut tanpa melibatkan pihak swasta.

"Dari investasi infrastruktur periode 2020-2024 sebesar Rp6.445 itu, sekitar 42% merupakan partisipasi swasta. Porsi pemerintah sebesar 37% dan BUMN sebesar 21%," kata Direktur Transportasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Ikhwan Hakim, di Jakarta, kemarin.

Kendati demikian, lanjut Ikhwan, beban yang harus ditanggung pemerintah masih terbilang besar.

getkan proyek yang selesai hingga akhir tahun mencapai 103. Tahun 2020, diproyeksikan 143 dari 223 proyek dituntaskan.

"Memang perlu keikutsertaan swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Pengadaan tanah juga menjadi kunci, selain proses perizinan dan harmonisasi peraturan penyediaan infrastruktur. Yang paling penting ialah sinergi dan koordinasi," sambung Wahyu.

Kebijakan pendukung

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan bahwa jumlah 223 PSN dan 3 program tambahan mempunyai nilai investasi Rp4.183 triliun.

Pemerintah menetapkan 37 proyek prioritas dengan total nilai investasi di atas Rp2.500 triliun yang diawasi KPPIP.

"Untuk mendorong pembangunan infrastruktur, pemerin-

Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan terobosan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah fokus pada tiga sektor pembangunan infrastruktur, yakni infrastruktur dasar, interkonektivitas infrastruktur, dan infrastruktur kota.

"Di sektor perkotaan yang diutamakan ialah pembangunan transportasi massal di enam kota besar," lanjut Ikhwan.

Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo, menyebutkan progres pengerjaan 223 proyek strategi nasional (PSN) dan 3 program tambahan telah mencapai 80,3%.

Capaian itu merupakan proyek yang telah masuk tahap konstruksi, sedangkan hingga September 2019, sebanyak 81 PSN yang telah diselesaikan.

"Secara kumulatif PSN ini sudah dimulai sejak 2016. Sampai September 2019 sudah 81 proyek selesai," ujar Wahyu dalam seminar nasional bertema *Infrastruktur menuju Indonesia maju 2024* di Jakarta, kemarin.

Menurut Wahyu, KPPIP menar-

tah perlu dukungan pembiayaan, terutama swasta sehingga pemerintah berencana membuat berbagai kebijakan fiskal, institusi, dan regulasi. Pembiayaan infrastruktur strategis mayoritas oleh swasta dan BUMN," ungkap Darmin.

Dari sisi fiskal, pemerintah telah mengembangkan berbagai dukungan pembiayaan dan penjaminan untuk menarik investor pada proyek yang kurang layak finansial, yaitu *viability gap fund* (VGF), *availability payment*, dan insentif pajak.

"*Tax holiday* yang dirumuskan belum lama juga sangat urgen untuk infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga mentransformasi institusi dengan membentuk dan memperkuat lembaga percepatan infrastruktur, seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan KPPIP," kata Darmin.

Darmin menegaskan dampak pembangunan infrastruktur mulai terasa karena turut memperbaiki kinerja logistik yang membaik pada 2010-2018 dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. (Ant/X-3)

Judul	HTI Dikembangkan Jadi Sentra Ibu Kota Baru	Tanggal	Kamis, 03 Oktober 2019
Media	Republka hal 3		
Resume	Pemerintah hingga saat ini belum menetapkan lokasi pusat ibu kota baru.		

HTI Dikembangkan Jadi Sentra Ibu Kota Baru

Republika - 03/10/2019

HTI Dikembangkan Jadi Sentra Ibu Kota Baru

PENAJAM - Pemerintah hingga saat ini belum menetapkan lokasi pusat ibu kota baru. Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro saat saat meninjau kawasan PT ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pamaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu.

Dia mengatakan, lokasi sentra pemerintahan di ibu kota baru belum ditetapkan, tetapi proses konstruksi akan dimulai pada 2020.

"Kawasan konsesi hutan tanaman industri (HTI) PT ITCI Hutani Manunggal akan dijadikan pengembangan ibu kota negara baru," ujar Bambang, Rabu (2/10).

Kunjungan Kepala Bappenas bersama dengan Menteri Agraria

dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil dilakukan sebagai tindak lanjut persiapan rencana pemindahan ibu kota Indonesia. Sebelumnya, pada 26 Agustus lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan lokasi ibu kota baru, yakni sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Selain meninjau kawasan

konsesi di Kecamatan Sepaku, rombongan dua pejabat negara tersebut juga melihat kemajuan pembangunan Jembatan Pulau Balang di Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam.

"Seluruh wilayah daratan di sekitar jembatan Pulau Balang itu dapat dimanfaatkan oleh negara," ujar Sofyan Djalil.

Wakil Bupati Penajam Paser Utara Hamdam mengatakan, wi-

layah yang dipimpinnya memiliki kesiapan untuk menjadi lokasi pusat ibu kota negara. Hamdam pun berharap, pemindahan ibu kota Indonesia akan berlokasi persis di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Di Balikpapan, Kalimantan Timur, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meluncurkan sayembara berta-

jud "Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara", Rabu.

Menurut Basuki, sayembara tersebut bertujuan menjangkau berbagai gagasan terkait desain kawasan ibu kota baru Indonesia. Pemerintah, kata dia, mendorong partisipasi seluruh masyarakat, khususnya yang memiliki keahlian dalam bidang arsitektur dan tata kota.

■ antara ed: hasanul rizqa

Judul	Pindah ke Kaltantan Tanpa Ribet	Tanggal	Kamis, 03 Oktober 2019
Media	Majalah Indonesia hal 10		
Resume	Lima menteri tetap bersemangat Mengusug Program pemindahan ibu kota. Dua Negara jadi contoh sukses memindahkan ibu kota kurang dari lima tahun		

Pindah ke Kalimantan tanpa Ribet

Lima menteri terkait tetap bersemangat mengusung program pemindahan ibu kota. Dua negara jadi contoh sukses memindahkan ibu kota kurang dari lima tahun.

RUDI AGUNG

rudi_agung@mediaindonesia.com

SEMANGAT dan optimisme ditiupkan Bambang Brodjonegoro, siang kemarin. "Indonesia dapat mencontoh Brasil dan Pakistan yang berhasil memindahkan ibu kota negara dalam waktu kurang dari lima tahun," ungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu, kemarin.

Bambang tidak sendiri. Ada empat sejawatnya yang juga meniupkan napas sama, saat mereka berbicara dalam dialog Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Baru NKRI. Acara yang digelar Perkumpulan Insan Pers selama dua hari, Selasa-Rabu (1-2 Oktober), di Balikpapan itu juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Lebih jauh, Bambang menyatakan kedua negara itu memindahkan ibu kotanya pada era 1960-an. Teryata membangun ibu kota baru dari nol hingga bisa beroperasi sebagai pusat pemerintahan bisa dilakukan selama lima tahun.

Brasil memindahkan ibu

kota dari Rio De Janeiro ke Brasilia. Tanah di tempat baru ini relatif kosong, ada penduduk, tetapi minim kegiatan.

Pakistan memindahkan ibu kota negara dari Karachi ke Islamabad. Karachi yang berada di pinggir pantai dianggap sudah tidak terkendali karena juga menjadi kota dagang dan bisnis. Pada 1963, ibu kota dipindahkan hanya dalam kurun empat tahun.

"keberhasilan Brasil dan Pakistan seharusnya juga bisa dilakukan di Indonesia dalam periode waktu yang sama, atau bahkan lebih cepat. Ada dukungan teknologi yang lebih maju, kemampuan tenaga kerja yang lebih baik, serta dukungan infrastruktur yang lebih baik," tandasnya.

Pindah duluan

Menyokong rekannya, Menteri Basuki mengaku mendapat perintah khusus dari Presiden Joko Widodo untuk lebih dulu berkantor di Kalimantan Timur. "Kami harus menyiapkan infrastruktur dasar. Mulai drainase, jalanan, fasilitas, gas, dan listrik."

Untuk menyiapkan ibu kota baru, Basuki tidak mau sendiri. Kementerian yang dipimpinnya menggelar sayembara desain ibu kota. "Kami mengajak semua warga memberikan usulan tentang ibu kota."

Selain menggelar dialog,

Menteri Sofyan Djalil dan Menteri Bambang juga melakukan peninjauan ke lokasi ibu kota di Penajam Paser Utara. Saat menginjakkan kaki di Pulau Balang, Sofyan memastikan pulau itu akan dimanfaatkan. "Lahannya milik negara sehingga pemerintah berhak mengatur pemanfaatannya."

Para pelaku usaha di Kalimantan Timur juga sudah membayangkan masa depan cerah di wilayahnya. "Bagi kami, ibu kota baru merupakan harapan besar bagi pelaku usaha. Terutama terkait soal kemudahan perizinan," ungkap Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Balikpapan Yaser Arafat.

Namun, ia mengingatkan masih banyak yang harus dibenahi di Kalimantan Timur. "Regulasi perizinan belum berpihak kepada investor. Arah pembangunan juga kerap berubah arah."

Ia mencontohkan soal Kawasan Industri Kariangau, yang sampai saat ini dinilai belum laik sebagai kawasan industri. "Banyak lahan kosong yang dibiarkan menganggur."

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Tutuk SH Cahyono, juga meminta pemerintah memperbaiki regulasi sehingga mendorong iklim investasi yang lebih baik. "Agar investor tidak hanya melirik pertambangan." (Ant/N-2)

Judul	Kaji Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota	Tanggal	Kamis, 03 Oktober 2019
Media	Kompas hal 16		
Resume	Pemerintah diharapkan Mengkaji aspek social dalam pemindahan ibu kota Negara ke Kalimantan timur . kajian tersebut penting agar proses pembangunan dan pemindahan berjalan tertib		

Kaji Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota

Sejumlah kementerian terus mempersiapkan proses pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

BALIKPAPAN, KOMPAS — Pemerintah diharapkan mengkaji aspek sosial dalam pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Kajian tersebut penting agar proses pembangunan dan pemindahan berjalan tertib.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pers periode 2013-2016 Bagir Manan dalam sesi diskusi pada hari kedua bertajuk "Rancang Bangun dan Kesiapan Kaltim sebagai Ibu Kota Negara", Rabu (2/10/2019), di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Turut menyampaikan paparan dalam diskusi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit Hardwinarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur Kaltim Isran Noor.

Pemindahan ibu kota negara, menurut Bagir, bukan hanya

persoalan teknis dan administratif. Pemindahan ibu kota negara akan mengubah tatanan besar keindonesiaan yang perlu kajian sosial serius.

"Aspek sosial dari demokrasi dan negara hukum tidak dapat hanya dibangun melalui sistem anggaran. Ini akan mengubah tatanan perikehidupan dan kebangsaan Indonesia. Saya mohon para pengambil kebijakan memperhatikan prinsip-prinsip tatanan masyarakat yang ada," katanya.

Proses pemindahan ibu kota negara masih menunggu pembahasan berbagai undang-undang di DPR. Presiden Jokowi mengumumkan bahwa lokasi yang paling cocok dijadikan ibu kota negara baru adalah sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, di Kaltim. Meski lokasi pasti belum diumumkan, saat ini berbagai kementerian sudah mulai menyiapkan berbagai konsep pemindahan ibu kota.

Bambang mengatakan, salah satu faktor utama pemindahan ibu kota adalah kesenjangan ekonomi di Indonesia. Selama ini, produk domestik regional bruto Jawa dan Sumatera men-

dominasi dengan angka 80 persen dari produk domestik bruto. Penyebabnya, investor masih memilih Pulau Jawa dan Sumatera untuk berinvestasi.

"Pemindahan ibu kota negara baru ke luar Jawa diharapkan mengubah orientasi investor. Untuk mendukung itu, akan dikembangkan juga enam kota metropolitan di luar Jawa, antara lain Medan, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, dan Manado," katanya.

Kajian lingkungan

KLHK juga tengah menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pemindahan ibu kota negara. Dengan konsep ibu kota baru berupa *forest city*, minimal ruang terbuka hijau 50 persen dari total luas area.

"KLHS meminimalkan kerusakan lingkungan," ujar Sigit.

Kemenhub menunjang konsep itu dengan membuat jaringan transportasi massa berbasis teknologi ramah lingkungan. Seluruh transportasi massal, seperti disampaikan Budi, bakal terintegrasi dan terhubung. Dengan demikian penggunaan kendaraan pribadi

oleh aparat sipil negara dan masyarakat bisa diminimalkan.

Pada saat yang sama, Kementerian PUPR juga menjalankan pembangunan berbagai infrastruktur. Dalam pemaparannya, Basuki sekaligus meluncurkan program sayembara desain ibu kota negara yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat, yang bisa dilihat di Sayembaraikn.pu.go.id.

"Pada 2020-2023, dijadwalkan akan membangun infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan," kata Basuki.

Pembangunan istana negara, kompleks MPR, DPR, DPD, serta kementerian dan lembaga dijadwalkan lebih lama, yakni pada 2020-2024. Seluruh pembangunan di ibu kota negara baru akan dibuat untuk menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Terkait infrastruktur air bersih, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Anang Muchlis mengatakan, tiga bendungan disiapkan untuk menyuplai air baku mutu, meliputi Bendungan Beruas, Batu Lepek, dan Bendungan Sepaku Semoi. (CIP)